

Judul : Komisi X DPR dorong perbaikan desil yang keliru & tak sesuai
Tanggal : Sabtu, 29 Agustus 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Lindungi Hak Warga Miskin

Komisi X DPR Dorong Perbaikan Desil Yang Keliru & Tak Sesuai

Komisi X DPR mendorong pembenahan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penentuan penerima bantuan Pemerintah. Ketidaksesuaian data desil berpotensi menghilangkan hak masyarakat penerima bantuan perlindungan sosial, termasuk pendidikan.

WAKIL Ketua Komisi X DPR Kurniasih Mufidayati mengatakan, pihaknya tengah mengumpulkan data lebih lengkap mengenai perubahan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke DTSEN. Temuan menunjukkan ketidaksesuaian data. Warga yang seharusnya masuk desil empat tercatat desil enam, sedangkan kelompok desil sepuluh justru masuk desil empat.

Meskipun ketidaksesuaian itu tidak terjadi di seluruh daerah, tapi kekeliruan klasifikasi tetap perlu perhatian serius. Karena perubahan desil berdampak langsung terhadap akses masyarakat dalam memperoleh bantuan Pemerintah, khususnya pendidikan. Itu jadi bahan diskusi di DPR agar warga desil satu sampai empat tetap berhak menerima bantuan.

Dikatakan, ada masyarakat berbiaya hidup desil empat tapi dalam DTSEN tercatat di desil lima. Perubahan itu berpotensi menggugurkan kriteria penerima

bansos dan bantuan pendidikan. "Makanya, DPR berupaya memastikan kelompok desil satu sampai empat tetap memperoleh hak bantuan pendidikan serta bantuan lainnya," jelasnya, Jumat (28/8/2026).

Selanjutnya, perbaikan akurasi data sosial tidak bisa diselesaikan satu Kementerian/lembaga saja. Pembaruan itu perlu melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Percepatan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), serta Kementerian Sosial (Kemensos). Sinergi ini diperlukan karena banyak lembaga menggunakan DTSEN sebagai basis penyaluran program bantuan.

Selain itu, definisi dan kriteria penerima bantuan berdasarkan kelompok desil juga didorong untuk ditinjau kembali. Mekanisme penetapan desil perlu memperhitungkan dinamika perubahan data di lapangan secara objektif.



Kurniasih Mufidayati

Langkah itu dilakukan agar masyarakat yang secara faktual masih membutuhkan bantuan tidak kehilangan hak akibat kendala administratif pemutakhiran data.

Dia berharap, sensus ekonomi yang sedang berlangsung jadi momentum tepat memperbarui basis data sosial ekonomi masyarakat. Pemutakhiran ini diharapkan mampu melahirkan klasifikasi desil yang lebih akurat dan adil di masa mendatang. "Dengan demikian, data mampu menggambarkan kondisi riil warga demi menyejahterakan rakyat," katanya.

Wakil Ketua Komisi X DPR MY Esti Wijayati turut menyoroti anomali penentuan desil yang

mengganggu ketepatan sasaran bansos dan bantuan pendidikan. Ketidaksesuaian data dengan kondisi faktual membuat keluarga yang berhak justru kehilangan akses perlindungan sosial. Permasalahan ini mengancam pemenuhan hak dasar warga miskin.

Esti mencontohkan kasus Timbul, seorang tukang becak di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang status kesejahteraannya melonjak dari desil satu jadi desil sembilan. Perubahan itu berdampak langsung pada putranya Luki Arya Wijaya yang diterima di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).

Akibat lonjakan desil itu, Luki kesulitan memperoleh keringanan UKT dan mengakses Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah karena dianggap mampu. "Meski UNY mengizinkan perkuliahan tetap berjalan selama perbaikan data, Pemerintah perlu memberikan kepastian agar mahasiswa tidak kehilangan hak pendidikan akibat kesalahan sistem administrasi," ingatnya.

Dia mendorong Pemerintah mempercepat koreksi data mahasiswa penerima KIP Kuliah yang terdampak anomali desil. Proses perbaikan data wajib selesai sebelum mahasiswa kehilangan

hak atas layanan pendidikan tinggi. Koreksi data perlu mengikuti tenggat kebutuhan nyata masyarakat dan tidak terhambat lambatnya ritme birokrasi negara.

Akurasi penentuan desil, lanjutnya, memengaruhi akses warga terhadap Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Ketidaktepatan desil berakibat langsung pada salah sasaran bansos. Dampaknya, sebagian masyarakat miskin kehilangan hak penerimaan berbagai program bantuan negara.

Esti menyebut, Komisi X DPR menerima banyak keluhan masyarakat mengenai perubahan desil yang berdampak pada akses PIP dan KIP Kuliah. Hanya desil satu hingga empat yang berhak mengakses program bantuan itu. "Tapi banyak desil warga berubah secara tiba-tiba tanpa ada penjelasan indikator yang memadai," ungkapnya.

Setiap perubahan desil, sambung Esti, perlu disertai informasi indikator dasar perubahan secara transparan. Selain itu, masyarakat juga memerlukan mekanisme pengajuan keberatan yang sederhana, hasil verifikasi terlacak, serta kepastian batas waktu. ■ **PYB**